

PEREMPUAN DAN DEMOKRASI: TANTANGAN DAN HAMBATAN DEMOKRASI BAGI PEREMPUAN DENGAN KOMPARASI MUSLIMAH INDONESIA DAN ARAB SAUDI

Oleh:

Siti Maryamah Kadriyah

Graduate School of State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta,
Indonesia

Email: smaryamah255@gmail.com

Abstrak

Perjuangan demokrasi bagi perempuan merupakan suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan dan demokrasi bagi Perempuan dalam sebuah negara baik di Negara Indonesia maupun Negara Arab Saudi. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Temuan menunjukkan bahwa terdapat diskriminasi gender masih menjadi permasalahan utama. Dalam penelitian ini Keluhan aktifis perempuan tentang kondisi sosial-politik Saudi, adalah soal kultur. Sedangkan di Indonesia, diharapkan keterlibatan perempuan dapat memberikan kontribusi bagi kondisi ideal dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia. Pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa demokrasi dapat diakui sebagai satu-satunya solusi untuk masalah-masalah sosial yang diterima oleh semua kalangan.

Kata Kunci: Demokrasi, Tantangan, Hambatan, Perempuan, Indonesia, Arab Saudi

A. PENDAHULUAN

Perempuan sebagai manusia adalah makhluk dan hamba Tuhan seperti juga laki-laki. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut Alquran saling bekerjasama untuk tugas keagamaan, menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-teks Alquran juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sebagai hamba Tuhan Perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mennyejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan “al-ahliyyah” atau kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut.

Perempuan sebagai warga negara punya Hak Asasi manusia, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di tempat dimana HAM dilindungi, individu dan kelompok dapat berkembang

dengan bebas dan memperkenalkan kepentingan, keyakinan dan nilai-nilai demokrasi mereka masing-masing ke dalam proses kehidupan.

Saat ini telah dinyatakan oleh banyak Negara bahwa sistem demokrasi-lah yang paling ideal untuk kemajuan suatu Negara, setidaknya untuk saat ini. Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk kesekian kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang 'berpengaruh' (Hendra, 2008).

Surlin dan Fatmawati (2022:20) mengutip John Dewey yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlu partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan Bersama.

Demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Indonesia sebagai Negara demokratis sudah melewati decade di bawah pemerintahan *otoriter*. Namun dimulai dari era reformasi, bangsa Indonesia telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik. Bangsa Indonesia saat ini dapat menyuarakan suara dan mengaktualisasikan keinginan dari prioritas mereka. Demokratisasi negri ini masih membutuhkan waktu yang lama dan hanya akan berhasil, apabila warga Indonesia turut berperan aktif, campur tangan, membela hak-hak mereka dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Untuk itu kesempatan emas ini jadikan sebagai ruang memperkuat demokrasi dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan memolesnya dengan adaptasi terhadap perkembangan jaman yang terjadi pada setiap situasi dan kondisi kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam menjaga, melestarikan, mengisi, dan menumbuh kembangkan Negara menjadi kewajiban bagi setiap warga yang hidup dalam Negara tersebut tanpa melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Riyadh - di Arab Saudi, sekelompok wanita mengkampanyekan perubahan peran wanita di dalam masyarakat. Kampanye ini digalakkan saat perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017. Kampanye ini juga menyoroti pengembangan potensi ekonomi bagi wanita Saudi. Seperti dilansir *Reuters*, Rabu (8/3/2017), Saudi dikenal luas sebagai negara dengan segregasi jenis kelamin paling besar di dunia. Kaum wanita hidup di bawah pengawasan dan pengawalan anggota keluarganya yang berjenis kelamin laki-laki. Kaum wanita tidak boleh mengemudi mobil seorang diri. Di tempat umum, kaum wanita harus mengenakan pakaian yang menutup aurat dari kepala hingga kaki.¹

Perjuangan demokrasi bagi perempuan merupakan suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara utuh yang memiliki otonomi terhadap tubuhnya serta membuka peluang bagi perempuan untuk

¹ Novi Christiastuti-detikNews, FOKUS BERITA: [Hari Perempuan Internasional](#), 08 Mar 2017, 12:59 WIB, h.1

mengakses ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi basis peningkatan produktivitas sekaligus menjadikan perempuan tenaga kerja yang handal dan kompeten dalam lapangan produksi. Seiring dengan itu menjadi tugas perempuan dalam pengawalan terhadap demokrasi untuk terus menerus menciptakan mekanisme partisipasi, baik melalui pembentukan wadah perempuan progresif maupun persatuan gerakan perempuan, sehingga persoalan perempuan tidak lagi hanya menjadi bayang-bayang kelompok perempuan, tapi juga menjadi kepentingan publik untuk menyelesaikannya sebagai bentuk responsitas perempuan dan demokrasi.²

Nilai-nilai demokrasi harus menyentuh ke area perempuan dan dapat dirasakan oleh perempuan secara substansial bukan struktural belaka yang hanya menjadi sebuah perdebatan dikalangan publik, sebagai keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang humanis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, surat kabar dan karya ilmiah. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.³ dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji.

C. PEMBAHASAN

1. Realitas Perempuan Dalam Berbangsa dan Bernegara di :

a) Indonesia

Dalam tradisi budaya patriarki, “politik” diklaim sebagai dunia laki-laki karena dianggap sebagai ranah republik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negative. Istilah yang sangat populer misalnya *politic is dirty*. Karena faktor keras dan kotornya dunia politik ini, banyak orang berpandangan kalau politik memang milik laki-laki. Pandangan ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam masyarakat, yang menghambat partisipasi perempuan dalam dunia politik. Akibat lebih lanjut dari kurangnya partisipasi perempuan, adalah banyaknya kebijakan politik yang tidak ramah pada perempuan. Persoalan pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan peran-peran politik. Pandangan seperti ini tidak bisa dilestarikan, karena itu harus diubah dengan yang lebih egaliter bahwa “dunia politik bukan hanya milik laki-laki tetapi milik perempuan juga”. Dengan menerima pandangan ini, maka semua

² Linda Sudiona, *Perempuan Dalam Demokrasi*, Posted by, Perempuan Mahardika, at 23.23, 02 Juni 2011

³ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

agenda politik yang tidak memiliki keberpihakan kepada perempuan sebagai kelompok yang banyak terkena dampak dari kebijakan harus ditolak.

Sudah saatnya kaum perempuan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di negeri ini. Kalau tidak, kondisi perempuan akan terus terpuruk dan perubahan yang menyangkut kepentingan perempuan tidak akan pernah terjadi. Undang-undang dan kebijakan yang menguntungkan perempuan tidak biasa diwakili oleh laki-laki harus dipejuangkan oleh kaum perempuan sendiri. Karena perempuan mempunyai kepentingan dan kebutuhan khas yang hanya bisa dipahami oleh perempuan sendiri diantara isu kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kepedulian terhadap anak, kelompok lanjut usia dan sebagainya. Selain itu, kalau dibedah satu persatu dari seluruh Undang-undang dan kebijakan yang ada, terlalu banyak untuk disebutkan klausul-klausul yang tidak berpihak pada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan harus masuk dalam pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif. Ironisnya yang menjadi perdebatan persoalan seringkali terjebak pada perdebatan terminologi, misalnya ketika wacana afirmative action atau kouta digulirkan banyak terjadi penolakan bahkan oleh pejabat tinggi negara. Alasannya macam-macam, yang kontraproduktif, kontraprestasi, perempuan yang tidak adil, mau menang sendiri dan sebagainya. Perdebatan panjangun terjadi dan berlangsung lama, ternyata mereka menolak hanya karena soal istilah, tidak mau menggunakan istilah kouta tetapi “prosentase”.

Didalam era reformasi dan demokratisasi sekarang ini, kontribusi dan potensi perempuan harus diperhitungkan dan dikembangkan menjadi kekuatan baru dalam mencapai pembangunan yg berkelanjutan. Keterwakilan perempuan di legislatif sedikitnya 30 persen sangat penting karena dengan jumlah tersebut dimungkinkan terjadi perubahan dalam pengambilan keputusan maupun dalam penetapan prioritas pengalokasian sumberdaya dan dana berkaitan dengan kebijakan politik.

Ketimpangan kedudukan perempuan dibanding laki-laki selama ini disebabkan oleh nilai-nilai yang dikonstruksi masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pola pikir (mind set), yang membakukan citra perempuan seperti ini masih tertanam kuat tidak hanya dikalangan awam tetapi pada sebagian besar pengambilan kebijakan publik di Republik ini, baik di DPR, di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Tanpa adanya tindakan khusus sebagai suatu terobosan, ketimpangan akan terus berlangsung dari kesetaraan dan keadilan jender yang diamanatkan oleh rakyat/MPR-RI tidak akan terwujud.

Pemberdayaan terhadap kaum perempuan terus menjadi kebutuhan dan selalu aktual sepanjang struktur sosial didalam masyarakat masih bertumpu pada hegemoni budaya patriarki, dimana kaum perempuan selalu berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan. Berbagai program telah diajukan untuk meningkatkan posisi dan peran serta perempuan dalam berbagai sektor kehidupan baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi pemerintah. Termasuk didalamnya berbagai teori dikembangkan seperti *Woman In Development* (WID) dan *Gender And Development* (GAD) maupun yang

belakangan dikembangkan seperti Development Alternatif with Women for New Era (DAWN) dan sebagainya.

Namun faktanya kesenjangan gender tetap saja terjadi baik terhadap akses alokasi sumber-sumber material dan non material, maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan di legislatif dan eksekutif.⁴

Serupa dengan perkembangan internasional, di Indonesia dengan diberlakukan kuota yang menyatakan bahwa minimal 30 % (persen) dari kursi dalam setiap partai, di parlemen legislative maupun eksekutif harus diduduki oleh perempuan, sejak tahun 2004 perempuan dan pemerintah Indonesia berniat untuk terus meningkatkan keberadaan perempuan dalam segala tingkatan politik.⁵

Perempuan dan politik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Politik adalah pengambilan keputusan yang bisa terjadi banyak tempat, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga bagi perempuan, politik adalah keseharian (*daily politics*).⁶ Atas dasar asumsi tersebut, seharusnya perempuan Indonesia lebih banyak berkontribusi dalam ranah lembaga politik, seperti jumlah representasi perempuan pada jabatan-jabatan publik di pemerintah. Namun, kenyataannya perempuan seringkali dihadapkan kepada kondisi pembedaan antara peran privat dan publik. Tidak hanya di Indonesia, namun banyak juga terjadi di beberapa negara di Timor Tengah dan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Laos atau Vietnam.⁷ Peran privat yang dikenal identik dengan perempuan adalah peran yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, dapur, serta masalah domestik keluarga. Di lain sisi, peran publik sering dianggap tabu bagi keterlibatan perempuan, misalnya, peran di kelembagaan politik atau partisipasi sebagai pemangku jabatan politik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, perempuan merupakan setengah dari populasi di Indonesia.⁸ Suatu paradoks politik⁹ jika mereka hanya menempati peran dan posisi yang tidak strategis dalam berbagai tingkatan pemerintahan (*under-represented*). Pada pemilu 2009, hasil dari Pemilu Legislatif perempuan hanya mencapai 18 persen,¹⁰ itupun yang terepresentasi lebih banyak bukan dari gerakan perempuan, (artis, istri pejabat, tokoh selebritis non-gerakan perempuan) sehingga muncul asumsi bahwa harapan kebijakan pro perempuan yang akan diangkat kemungkinan kecil dapat direalisasikan. Ketimpangan jumlah perwakilan antara perempuan dengan laki-laki di dalam lembaga

⁴ Maria Ulfah Anshor, *nalar politik PEREMPUAN PESANTREN*, (Cirebon, Fahmina Institut, 2006), h, 3-6

⁵ KAS, *Perempuan yang kuat untuk demokrasi yang kuat*, (seminar pelatihan politisi Perempuan yang Berbakat), Balikpapan, 24 Februari 2014.

⁶ Subono, '*Tokoh Politik Perempuan di Asia : Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan ?*', *Jurnal Perempuan* . vol. 63 no.1, NI 2009, pp.79

⁷ *Ibid.*, pp.80.

⁸ Badan Pusat Statistik 2013, *Jenis Kelamin Penduduk*, Badan Pusat Statistik, viewed 05 April 2013, <<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>>

⁹ Terminologi yang sama juga digunakan oleh Kuzuki Iwanaga, seorang ilmuwan politik, untuk menggambarkan kondisi partisipasi perempuan dalam politik di Asia.

¹⁰ Amirrudin, M. 2009, '*Demokrasi, Golongan Putih dan Potensi Gerakan Perempuan*', *Jurnal Perempuan*, vol. 63, no.1, pp. 91

pengambilan keputusan ini dapat berimplikasi terhadap ketimpangan gender dalam berbagai bidang, seperti kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jika diamati melalui ketentuan UUD 1945 secara formal, terlihat bahwa negara sebenarnya menolak diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap warga negaranya. Selain itu, negara juga memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) agar setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai keadilan. Hak-hak politik warga negara antara lain telah tercantum dalam pasal 27 (1), 28 E (3) dan 28 H (2). Lebih lanjut lagi, komitmen Indonesia terhadap keterlibatan perempuan dalam politik sudah ditunjukkan oleh upaya Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak politik perempuan (UN Convention on Political Rights of Women) melalui UU NO.68 tahun 1958 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Masih dibawah kepemimpinan beliau, Indonesia kembali meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women disingkat CEDAW) melalui UU No.7/1984.18 Tidak sampai pada komitmen dibawah framework Internasional, Indonesia pada tahun 2003 di Bulan Februari, kembali mengadopsi UU Pemilu No. 12 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal.¹¹ Walaupun peran perempuan telah diatur sedemikian rupa dalam konstitusi, namun pada kenyataannya peluang perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik di Indonesia masih bergantung kepada partai politik tempat perempuan tersebut bergabung, sehingga kesempatan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif harus melalui keputusan dari partai politik yang bersangkutan. Minimnya jumlah perempuan dalam arena legislatif disebabkan oleh beberapa tindakan diskriminasi terhadap gender. Para perempuan yang telah bergabung ke dalam partai politik mengemukakan beberapa kesulitan yang terkait perlakuan partai, diantaranya adalah pencalonan calon legislatif oleh partai yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai calon utama (calon nomor satu) dan acap kali memposisikan perempuan hanya sebagai pelengkap persyaratan untuk memenuhi batas kuota.¹² Jika kondisi seperti ini terus terjadi di Indonesia maka kerangka demokrasi nasional akan menjadi kerangka yang fana dan minim partisipasi. Peran Perempuan dalam Upaya Demokratisasi di Indonesia merujuk kepada teori demokrasi partisipatoris (*participatory democracy*),¹³ pemberian pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas

¹¹ Soetjipto, A 2009, '*Pemenuhan Hak-Hak Politik Perempuan Sejauh Manakah?*', Jurnal Perempuan. 45, pp. 102

¹² Rosiena, M 2013, '*Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau*', eJournal Pemerintah Integratif. viewed 05 April 2013, <[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/E-jurnal%20Mari%20Rosieana%20\(0204-13-03-55-57\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/E-jurnal%20Mari%20Rosieana%20(0204-13-03-55-57).pdf)>.

¹³ Walaupun terinspirasi oleh pemikiran Rousseau dan John Stuart Mill, namun teori demokrasi partisipatoris telah diformulasikan pada tahun 1970an oleh Pateman (1970) dan Macpherson (1977)

warga yang kuat (strong citizen communities) adalah sebuah keharusan yang mutlak. Dengan menggunakan pendekatan dari masyarakat maka konsentrasi pengembangan kapasitas masyarakat (capacity building) harus menjadi agenda utama pemerintah. Bentuk capacity building untuk perempuan harus ditingkatkan, misalnya dengan cara memberikan penyuluhan pendidikan politik ataupun pendampingan bagi calon pemimpin legislatif di tingkat daerah agar dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik. Jangan sampai pendidikan politik terus berputar pada tingkat elit politik. Walaupun pemberian pendampingan kepada kaum perempuan yang sudah terpilih di bangku legislatif dinilai penting, namun pemberian pendampingan kepada masyarakat di tingkat menengah kebawah harus mendapatkan porsi lebih. Di tingkat bawah inilah ketidakadilan seringkali luput dari kontrol negara. Komitmen perempuan sebagai bagian dari sebuah komunitas untuk membangun demokratisasi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan transformasi sosial. Bersamaan dengan hadirnya komitmen gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politik kaumnya, keterlibatan seluruh stakeholder dalam mengangkat hak perempuan juga diperlukan. Dibutuhkan kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat bahwa permasalahan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia bukan hanya persoalan perempuan menginginkan kesetaraan. Namun, harus disadari penuh bahwa keterlibatan yang seimbang serta kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga legislatif adalah bentuk upaya dari membangun demokratisasi di Indonesia. Walaupun terinspirasi oleh pemikiran *Rousseau* dan *John Stuart Mill*, namun teori demokrasi partisipatoris telah diformulasikan pada tahun 1970-an oleh *Pateman* (1970) dan *Macpherson* (1977)

Dalam banyak kasus, jumlah keterwakilan yang memadai di lembaga pengambilan keputusan akan mampu memperbaiki masalah-masalah yang menghambat kesejahteraan warga negara. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri yang disebabkan oleh pengalaman hidup dan kondisi biologisnya. Misalnya persoalan yang berkaitan dengan seksualitas, kesehatan atau hak reproduksinya. Sebagai contoh, fakta angka kematian ibu melahirkan di Indonesia 307/100.000 akibat penanganan yang buruk pada hak reproduksinya, tingkat buta huruf perempuan, dan lain sebagainya. Faktanya di negara *Skandinavia*, dengan keterwakilan perempuan di parlemen lebih dari 40 persen, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lebih baik karena korupsi sangat rendah, pemerintahannya efisien, dan penegakkan hukumnya transparan.¹⁴ *Korelasi* partisipasi perempuan dalam politik dan *good governance* yang disampaikan sebelumnya adalah kebanyakan tokoh politik perempuan yang hadir dalam situasi politik yang kacau atau pada saat-saat transisi politik menuju pemerintahan yang lebih baik, menghadirkan diri mereka sebagai agen-agen transnasional dengan mengusung agenda politik untuk menata ulang

¹⁴ Masruchah, 'Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia', *Jurnal Perempuan*, 2009, vol.63 no. 1, pp.115-116

rezim politik yang ada.¹⁵ Menurut *Andrea Fleschenberg*, seorang pengajar perbandingan politik di University of Duisburg-Essen, Jerman, kehadiran tokoh perempuan dalam lembaga politik seringkali dilihat sebagai "*transformational leaders*".¹⁶

b) Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang terletak di Jazirah Arab berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Arab merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Arab Saudi beribukota di Riyadh, dengan bahasa resmi bahasa Arab. Mata uang Arab Saudi yaitu real. Penduduk Arab Saudi mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab (mayoritas Islam). Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu.

Akar sejarah Kerajaan Arab Saudi bermula sejak abad ke-12 H atau abad ke-18 M. Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, lahirlah *Negara Saudi yang pertama* yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di "Ad-Dir'iyah", terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 H./1744 M dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Periode awal Negara Arab Saudi ini berakhir pada tahun 1233 H./1818 M. Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan *Negara Saudi kedua* pada tahun 1240 H./1824 M. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 H./1891 M. Pada tahun 1319 H./1902 M, Raja Abdul Aziz Rahimahullah berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyadh yang merupakan ibukota bersejarah kerajaan ini.

Semenjak itulah Raja Abdul Aziz mulai bekerja dan membangun serta mewujudkan kesatuan sebuah wilayah terbesar dalam *sejarah Arab modern*, yaitu ketika beliau berhasil mengembalikan suasana keamanan dan ketenteraman ke bagian terbesar wilayah Jazirah Arabia, serta menyatukan seluruh wilayahnya yang luas ke dalam sebuah negara modern yang kuat yang dikenal dengan nama Kerajaan Arab Saudi. Penyatuan dengan nama ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H./1932 M, merupakan *dimulainya fase baru sejarah Arab modern*. Raja *Abdul Aziz Al-Saud* Rahimahullah pada saat itu menegaskan kembali komitmen para pendahulunya, raja-raja dinasti Saud, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam, menebar keamanan dan ketenteraman ke seluruh penjuru negeri

Arab Saudi ialah negara dengan bentuk negara monarki absolut. Sistem pemerintahan Arab Saudi yaitu negara Islam yang berdasarkan syariah Islam

¹⁵ Fleschenberg, A n.d., 'Asia's Women Participation at The Top: Roaring Tigerness or Tame Kittens?', *Women's Political and Representation in Asia*, viewed 14 April 2013, <http://www.niaspress.dk/files/excerpts/Iwanaga-2_extract.pdf>.

¹⁶ Ibid.

dan Al Qur'an. Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan konstitusi Arab Saudi. Pada tahun 1992 ditetapkan Basic Law of Government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih berdasarkan garis keturunan atau orang yang diberi kekuasaan langsung oleh raja. Hal ini berdasarkan *pasal 5 Basic Law of Government* yang menyatakan kekuasaan kerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, dimana **raja merangkap perdana menteri dan anglima tinggi angkatan bersenjata Arab Saudi**. Pada tanggal 20 Oktober 2006 Raja Abdullah telah mengamandemen pasal ini dengan mengeluarkan UU yang membentuk lembaga suksesi kerajaan (Allegiance Institution) terdiri dari para anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz Al-Saud. Dalam ketentuan baru, raja tidak lagi memiliki hak penuh dalam memilih Putera Mahkota. Raja dapat menominasikan calon Putera Mahkota. Namun, Komite Suksesi akan memilih melalui pemungutan suara. Selain itu, bila Raja atau Putera Mahkota berhalangan tetap, Komite Suksesi akan membentuk Dewan Pemerintahan Sementara (Transitory Ruling Council) yang beranggotakan lima orang. Ketentuan ini baru akan berlaku setelah Putera Mahkota Pangeran Sultan naik tahta.¹⁷

Amnesty International Senin (21/10) mengatakan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi janjinya kepada PBB sejak tahun 2009, untuk menghentikan penangkapan dan penyiksaan atas para aktivis pembangkang. Dan menuding Arab Saudi melakukan *diskriminasi sistematis terhadap perempuan*. Pernyataan organisasi hak asasi manusia itu dikeluarkan menjelang pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa yang akan membahas masalah hak asasi di negara kaya minyak tersebut.

Amnesty mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Arab Saudi seperti “diskriminasi sistematis atas para perempuan baik secara hukum maupun praktik keseharian” serta “penyiksaan terhadap para buruh migran”

Para perempuan di kerajaan itu tidak dibolehkan menyetir kendaraan dan membutuhkan izin dari wali laki-laki untuk melakukan perjalanan.¹⁸

Sebagai negara kerajaan, Arab Saudi memang bukan negara demokratis. Banyak negara dan organisasi pemantau hak asasi manusia menyimpulkan negara Ka'bah itu memiliki catatan buruk soal penegakan hak asasi. Salah satu kasus masih disorot adalah *Narablog Raif Badawi*, divonis sepuluh tahun penjara dan seribu kali cambukan karena mengkritik rezim Bani Saud.

Tapi sejak tahun 2011, ketika mendiang Raja Abdullah menyatakan wanita bisa bergabung dalam badan penasihat pemerintah Dewan Syura, situasi untuk kaum wanita di Saudi mulai berubah. Langkah ini memicu

¹⁷ Angga Diharja Firdaus-detikNews, *POLITIK PEMERINTAHAN ARAB SAUDI*, Makarya Diharja, 21 Mei 2010, h. 1-2

¹⁸RUBRIK/Dunia, *Pelanggaran HAM di Arab Saudi Meningkat*, <http://dw.com/p/1A3CE>, 21.10.2013, h. 2-3

perekonomian yang lebih beragam, juga mendorong lebih banyak wanita yang bekerja dan mengurangi ketergantungan pada minyak.

Wanita di Saudi kini bisa bekerja di bidang retail dan di rumah sakit. Wanita juga diizinkan ikut serta dalam Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 2012. Tahun lalu, kaum wanita memiliki bagian sendiri dalam otoritas olahraga Saudi. Sedangkan untuk tahun ini, Bursa Saham Saudi memiliki direktur wanita pertama, *Sarah al-Suhaimi*.

Di tengah berbagai perubahan itu, Alwaleed Philanthropies, yayasan amal yang bertujuan memberdayakan wanita, menggelar konferensi. Konferensi itu akan membahas berbagai inisiatif dengan tema 'Saudi Women Can' untuk mendorong perubahan peran wanita di Saudi. "Ini merupakan saat yang tepat kita lebih menyadari pentingnya partisipasi wanita dalam pekerjaan, di berbagai sektor berbeda," tutur Putri *Lamia binti Majed Al Saud* selaku Sekretaris Jenderal Alwaleed Philanthropies. "Wanita telah mencapai banyak hal di negara kita dan kita sangat bangga akan hal ini, pencapaian yang tidak diketahui oleh mereka di luar komunitas. Seperti negara lain yang memiliki hambatan, kita mengakui itu, tapi kita akan melakukan hal yang terbaik untuk membuatnya lebih baik," imbuhnya.

Saudi saat ini menempati ranking 141 dari 144 negara dalam daftar Global Gender Gap 2016, yang merupakan laporan tahunan oleh Forum Ekonomi Dunia, yang menaksir bagaimana kiprah wanita dalam sektor ekonomi, politik, kesehatan dan pendidikan.¹⁹

Pangeran *Al-Walid bin Talal* dari Arab Saudi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Mei 2016. Di damping Duta besar Indonesia buat Arab Saudi *Agus Maftuh Abegebriel*, Menteri Sekretaris Negara *Pratikno*, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *Sudirman Said*. Pangeran *Al-Walid bin Talal* dari Arab Saudi mengagumi pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. "Pangeran Al-Walid sangat mengapresiasi Indonesia sebagai negara demokrasi berpengaruh," kata Duta Besar Indonesia buat Arab Saudi *Agus Maftuh Abegebriel* kepada *Albalad.co* melalui pesan Whats App. dengan mencontohkan pelaksanaan pemilihan umum langsung. "Tanpa harus ada kekerasan," ujarnya mengutip penilaian Pangeran *Al-Walid*. Indonesia pertama kali melaksanakan pemilihan langsung presiden dan legislatif pada 2004.

Arab Saudi yang telah dinilai mulai membuka keran demokrasi di era Raja Abdullah bin Abdul Aziz, dengan menunjuk sejumlah perempuan sebagai anggota Majelis Syura dan menggelar pemilihan langsung dewan kota. Banyak pihak berharap Visi Arab Saudi 2030 diumumkan Wakil Putera Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman akhir bulan lalu kian melonggarkan kebebasan di negeri Dua Kota Suci itu.²⁰

¹⁹ Novi Christiastuti-detikNews, FOKUS BERITA: *Hari Perempuan Internasional*, Rabu 08 Mar 2017, 12:59 WIB, h. 2

²⁰ Copyright Albalad.co. All right reserved, *Pangeran Al-Walid kagumi demokrasi Indonesia*, Senin, 13 Maret 2017

c) Perempuan di Pemilu ke-3 Arab Saudi

Pada 12 Desember 2015 lalu, Arab Saudi menyelenggarakan Pemilihan Anggota Dewan Kota (*Municipal Councils*) di seluruh wilayah Saudi. Yang menarik, di Pemilu *ketiga* ini perempuan terlibat sebagai pemilih bahkan menjadi kandidat untuk pertama kalinya. Keterlibatan perempuan dalam Pemilu tidak lepas dari perjuangan perempuan Saudi yang selama ini diperlakukan secara diskriminatif. Dalam hukum Saudi, misalnya, perempuan dilarang berpergian tanpa ditemani kerabatnya, bahkan menyetir mobil. Wilayah perempuan hanyalah di dalam rumah.

Perjuangan perempuan itu didukung mendiang Raja Abdullah. Sosok yang meninggal pada Januari 2015 itu memang dikenal sebagai pemimpin Saudi yang berpandangan progresif dan responsif pada perubahan zaman.

Pada tahun 2011, Raja Abdullah menetapkan bahwa perempuan Saudi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2015, baik sebagai pemilih maupun kandidat. Apa yang dilakukan Saudi itu mendapat apresiasi dari *Neng Dara Affiah*. Bagi Komisioner Komnas Perempuan, keterlibatan perempuan dalam Pemilu itu adalah kemajuan penting bagi perjuangan kaum perempuan di Saudi. Dan itu harus kita dukung bersama. Kita tahu perempuan di Saudi itu seolah terpasung. Kalau ingin keluar rumah dan bekerja di ruang publik kaum perempuan mendapat batasan-batasan yang sangat ketat. Kalau kita berkunjung ke pasar-pasar di Saudi dan di negara-negara mayoritas Muslim pada umumnya yang berniaga itu kebanyakan adalah laki-laki. Saat ini perempuan di Saudi mendapat “kemerdekaan” untuk menentukan hak pilih. Tapi, bagi aktivis perempuan di Indonesia dan di negara-negara maju, apa yang didapatkan perempuan di Saudi itu masih belum memuaskan.

Ada persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan di Saudi. Sebab di dalam perjanjian internasional disebutkan hak asasi manusia adalah hak asasi manusia. Artinya, hak asasi yang didapatkan kaum laki-laki semestinya juga didapatkan kaum perempuan. Ini adalah perjanjian internasional yang mestinya diikuti. Tapi di Saudi dan di negara-negara mayoritas Muslim itu hak-hak yang didapatkan kaum laki-laki tidak serta-merta didapatkan kaum perempuan. Padahal di dalam ajaran Islam sendiri tidak dibedakan antara hak kaum laki-laki dengan hak kaum perempuan. Hak bekerja, misalnya. Di negara-negara mayoritas Muslim dan di Saudi khususnya, hak itu tidak didapatkan kaum perempuan. Belum lagi hak-hak lainnya yang harusnya kaum perempuan dapatkan.

Meskipun wilayah Arab Saudi memiliki sejarah yang panjang dan telah dihuni selama ribuan tahun, Kerajaan Saudi Arabia ini terbilang sebagai Negara yang masih muda. Kerajaan ini muncul diawal abad ke-20 ketika Abdul Aziz ibn Saud (1882-1953) berhasil menaklukkan Semenanjung Arab.²¹

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-

²¹ Clive Gifford, *Ensiklopedia Geografi (Ensiklopedia Geografi Dunia untuk Pelajar dan Umum)*, (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2006), hal. 257.

Su'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut.

Tidak seperti kerajaan lainnya yang bercorak kerajaan modern, Arab Saudi walaupun terkesan kerajaan baru, dalam menjalankan sendi-sendi pemerintahannya menggunakan system kerajaan yang terbilang masih klasik dengan system Negara monarki absolut teokratik.

Seperti Negara-negara yang terbilang maju, seiring perkembangan zaman, jumlah masyarakat terpelajar dan berpendidikan tinggi di Arab Saudi sudah semakin berkembang, hal itu dapat kita lihat dari jumlah sarana dan prasana penunjang pendidikan dan jumlah macam pendidikan yang diajarkan. Namun, dengan banyaknya masyarakat yang terpelajar, semakin banyak pula masyarakat yang menuntut perbaikan di segala sector, baik di sector politik pemerintahan maupun lainnya.

Pada tahun 2003, pemilihan umum pertama dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Keputusan sidang Dewan Kabinet Arab Saudi itu merupakan berupa perluasan partisipasi penduduk dalam urusan daerah/kota melalui pemilihan umum (pemilu). Hal itu untuk mengaktualisasi dewan kota, di mana separuh dari anggota tersebut harus dipilih lewat pemilu. Keputusan itu tentu merupakan pertanda terus bergulirnya roda reformasi politik di salah satu negara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif.²²

2. Demokrasi

Demokrasi secara harfiah dapat kita fahami dari asal usul katanya yaitu demos dan kratos. Istilah demokrasi mengacu pada system pemerintahan masa Yunani yang disebut dengan demokratis, berasal dari kata Demos (rakyat) dan Kratos (pemerintahan). Secara bebas, demokrasi dapat diterjemahkan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Kemudian pada masa Romawi, orang-orang lebih menyukai istilah republik untuk menyebut sistem pemerintahannya. Republik berasal dari kata Res (peristiwa) dan Publicus (public), yang artinya kurang lebih sebagai sesuatu yang dimiliki oleh publik atau rakyat. *Robert A. Dahl*, seorang pakar masalah demokrasi Amerika menyatakan bahwa antara demokrasi dan republik tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal ini, karena istilah tersebut tidak akan dibedakan, dan untuk lebih memudahkan diskusi akan dipergunakan istilah demokrasi. Jadi demokrasi sering difahami oleh masyarakat umum secara sederhana sebagai pemerintahan dari rakyat.²³ Sesudah perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan Negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka "mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh" (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system if political and*

²² Ibid

²³ FES, "DEMOKRASI, Panduan bagi Pemula", (The Ridep Institute, 2003), h. 1-2

social organizations advocated by influential proponents).²⁴ Menurut *Thomas R. Dye* dan *Harmon Zeligler*, “Ide dasar dari demokrasi merefleksikan 4 hal *Pertama*, merupakan partisipasi rakyat di dalam keputusan yang membentuk kehidupan individu-individu dalam suatu masyarakat. *Kedua*, merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas dengan pengakuan hak-hak mayoritas, yaitu hak kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, mendapatkan informasi, membentuk partai Oposisi, dan menjalankan jabatan-jabatan publik. *Ketiga*, merupakan komitmen untuk menghargai martabat individu dan menjamin nilai-nilai kebebasan untuk kepemilikan. *Keempat*, suatu komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kehidupan yaitu, bagi setiap orang untuk mengembang kemampuan dirinya.”²⁵

Pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa ada empat kategori pembangunan dimana demokrasi pada akhirnya diakui sebagai satu-satunya solusi untuk masalah-masalah sosial yang diterima oleh semua kalangan :

- a) Pembangunan kota-kota metropolitan dimana masyarakatnya berasal dari budaya dan belajar untuk memahami dan menghormati satu sama lain.
- b) Disintegrasi masyarakat feodal, statis, serta berorientasi, agraris dan digantikan secara bertahap dengan ekonomi dinamis yang melibatkan perdagangan, industri, dan kerajinan. Dengan posisi mereka yang semakin penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, anggota masyarakat ini mulai meminta hak mereka untuk berpendapat dalam perpolitikan mereka.
- c) Pemisahan internal dalam tradisi agama. Hal ini diketahui pada saat reformasi abad ke 16 bahwa tradisi agama yang sama dapat kembali menyesuaikan diri dengan macam-macam cara agar sesuai dengan transformasi kondisi kehidupan sosialnya, sehingga kemudian dapat mempertahankan relevansinya dalam situasi yang berubah. Dengan cara ini maka usaha untuk meneruskan tradisi mungkin dilakukan. Dimana agama sudah sejak lama menjadi penjamin persatuan politik, namun sekarang menjadi sumber utama perbedaan dan konflik.
- d) Dengan modernisasi yang terus berjalan, pembangunan ekonomi itu sendiri membutuhkan kesempatan yang tidak dibatasi untuk berinisiatif semua orang dan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk kalkulasi bisnis mereka.

Kemajuan modernisasi pembangunan dan dalam interaksi mereka, biasanya menghasilkan pemikiran baru, dan kemudian melahirkan pergerakan politik baru. Kebutuhan untuk menjadikan *Hak Asasi Manusia* dan *demokrasi* sebagai dasar dari suatu negara semakin lama semakin diakui, karena hal ini dapat menyediakan kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baru yang beragam dengan cara yang dapat diterima oleh semua orang. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, jika digabungkan menawarkan jawaban yang paling meyakinkan untuk masalah-masalah agama dan keragaman sosial yang baru serta dinamika pembangunannya.²⁶

²⁴ Op. Cit., “Dasar-dasar Ilmu Politik”, h, 50

²⁵ Op.Cit. FES, h, 10

²⁶ Prof. Dr.Thomas Mayer, “Militer dan Demokrasi”, (d’Print Communication, 2004), h, 9-10

Demokrasi yang sempurna adalah sistem kekuasaan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan menegakkan hukum yang independen. Oleh karena itu, demokrasi merupakan perlindungan paling efektif terhadap penindasan negara atau kekuasaan rakyat yang tidak terkendali. Memiliki rasa aman dari berbagai ancaman seperti penindasan, hilangnya kebebasan, pelanggaran terhadap keutuhan kondisi fisik seseorang serta hak untuk mengungkapkan kepentingan hidup individu bersama-sama dengan orang lain merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Perlindungan terhadap semua ancaman itu merupakan tujuan demokrasi sebagai negara hukum.²⁷

3. Komparasi Demokrasi di Arab Saudi dan Indonesia Terhadap Perempuan

Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya, pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah manusia semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Sayangnya selama ini demokrasi hanya “berwajah” laki-laki. Seakan hanya laki-lakilah sebagai pelaku demokrasi itu. Perempuan seringkali dilupakan. Padahal gerakan perempuan merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi di Indonesia.

Kehidupan demokrasi di Arab Saudi boleh terbilang masih lambat pergerakannya, walaupun saat ini sudah mengalami perkembangan, hal ini disebabkan jumlah masyarakat berpendidikan yang masih kurang ideal, keluarga kerajaan yang masih menguasai berbagai sektor pemerintahan serta ekonomi kerajaan yang telah memanja kehidupan sebagian warga negaranya.

Kalau berkaca pada apa yang dialami *Indonesia*, hak perempuan untuk memilih itu sudah diberikan jauh-jauh hari. Indonesia pertama kali melakukan Pemilu secara langsung itu pada *tahun 1955*. Pada Pemilu itu hak untuk memilih diberikan kepada seluruh warga negara, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan. Sementara Arab Saudi hak pilih perempuan baru diberikan pada Pemilu *ketiga 12 Desember 2015*.

Dalam level itu, hak politik di Indonesia itu jauh lebih maju ketimbang di Arab Saudi. Indonesia sudah punya sejarah yang panjang melibatkan kaum perempuan dalam Pemilu. Di saat Indonesia memberikan lima jabatan menteri kepada kaum perempuan dan pos-pos kekuasaan serta politik diisi kaum perempuan, *Saudi* baru memberikan hak untuk memilih dan dipilih bagi kaum perempuan. Apa yang diberikan Saudi kepada kaum perempuan itu dalam perspektif global sangat tertinggal. Tapi bagaimanapun harus mengapresiasi perkembangan positif di Saudi dan pemberian dukungan bukan hanya dari internal masyarakat Saudi, tapi juga kita berikan stimulus dari luar.

Data komposisi antara pria dan wanita sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Pemilih pria sebanyak 1,36 juta orang, sementara perempuan 130 ribu

²⁷ Prof. Dr. Thomas Mayer, “Demokrasi”, (d’Print Communication, 2003), h, 1

orang. Dan kandidat pria 6000-an orang, sementara perempuan 900 orang. *Pertama*, Pemilu atau memilih di Saudi sepertinya belum menjadi kultur yang melekat dan menjadi kebutuhan kaum perempuan di sana. Itu berbeda dengan di sini (Indonesia, *red.*). Di sini yang bersemangat untuk menggunakan hak politiknya adalah kaum perempuan. *Kedua*, data itu sebenarnya menunjukkan bahwa kaum perempuan menjadi minoritas pemilih. Itu berdampak pada yang berkuasa dan yang bersuara. Jadi, tampak sekali dari data itu bahwa kaum perempuan di Saudi masih harus berjuang karena mereka masih menjadi minoritas dalam proses politik di sana. Minoritas sebagai pemilih dan sebagai pengambil kebijakan.

Problem lain yang menyertai para pemilih kaum perempuan itu adalah apakah mereka sudah menyadari hak-hak politik yang mereka pergunakan itu untuk kepentingan politik kaum perempuan sendiri. Kesadaran itu belum tumbuh. Di Indonesia saja yang punya sejarah lebih panjang soal kesadaran politik kaum perempuan itu belum optimal. Apalagi di Saudi. Pemilu itu sebenarnya hanya instrumen dari satu cara demokrasi. Di luar Pemilu ada instrumen-instrumen yang lain. Penguasa atau pengambil kebijakan di Saudi harus punya pandangan bahwa hak-hak kaum perempuan harus dipenuhi di sana, salah satu iklim demokrasi itu melalui mekanisme Pemilu.

Dalam keterlibatan perempuan dalam pemilu di Saudi, untuk kandidat perempuan tidak diperbolehkan memajang wajah mereka pada materi kampanye. Termasuk bertemu dengan pemilih mereka yang umumnya pria. Jika pembatasan itu berlaku juga bagi kandidat laki-laki dan aturannya memang seperti itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau pembatasan itu hanya diberlakukan pada kandidat perempuan itu adalah diskriminasi. Sebuah aturan itu dibuat, jika dibuat dalam *iklim demokrasi*, harus adil dan berlaku untuk semua kandidat yang mencalonkan diri. Tapi bila aturan itu hanya berlaku pada kandidat perempuan dan tidak berlaku pada kandidat laki-laki, maka itu aturan diskriminatif. **Dan tempat pemungutan suara (TPS) antara pria dan wanita itu dibedakan.** Itu artinya, hak memilih untuk kaum perempuan sudah dipenuhi di Saudi, tapi kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan masih tetap diberlakukan. Itu terlihat dari tiga hal, *Pertama*, soal aturan kampanye bagi kandidat perempuan. *Kedua*, perbedaan TPS kaum laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, jumlah pemilih perempuan. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Saudi yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan bisa dilihat juga dari berapa jumlah perempuan dalam parlemen di Saudi. Atau berapa banyak jumlah menteri atau jabatan setingkat menteri yang diisi perempuan. Saya tidak punya data soal ini. Jangan-jangan tidak ada perwakilan perempuan di situ. Jadi, hak memilih untuk kaum perempuan memang sudah dipenuhi. Tapi sejumlah kebijakan dan kultur yang sangat diskriminatif masih sangat dominan di Saudi.

Keluhan aktifis perempuan tentang kondisi sosial-politik Saudi, adalah soal kultur. Di Saudi sangat dominan kultur maskulinnya. Misalnya, yang diperbolehkan berniaga hanya laki-laki. Kaum perempuan juga dilarang keluar rumah tanpa mahramnya. Kaum perempuan juga diwajibkan memakai abaya. Intinya ruang publik itu miliknya kaum laki-laki sementara rumah itu ruangnya kaum perempuan. Akibat dari pengekangan kaum perempuan di Saudi itu muncul

rasa kejenuhan di kalangan kaum perempuan. Kejenuhan itu berimbas pada orang-orang terdekat, khususnya adalah pekerja rumah tangga (PRT) mereka. Perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap PRT itu salah satunya adalah akibat kejenuhan para majikan perempuan yang mengalami proses domestifikasi atau yang dirumahkan.

Budaya seperti itu didukung oleh tafsir agama, terutama dalam wujud fikihnya. Model tafsir agama itu semakin menguatkan kultur patriarki. Karena itu, sejauh yang saya tahu, kaum perempuan Saudi yang ingin mencari kebebasan dalam ilmu pengetahuan, mereka pasti tidak di dalam negeri. Mereka umumnya belajar ke luar negeri seperti di Amerika. Dan sejauh ini sangat sedikit intelektual perempuan dari Saudi yang menonjol dalam bidang akademis. Kebanyakan intelektual perempuan dari Timur Tengah yang menonjol umumnya dari Mesir dan Iran.

Hatoon Ajwadi Al-Fassi. Dalam pergaulan internasional sesama aktivis perempuan yang dikenal dari Saudi. Jadi, belum tumbuh aktivis-aktivis di Saudi yang memperjuangkan hak kaum perempuan. Berbeda jauh dengan Indonesia. Di Indonesia aktivis perempuan sudah banyak sekali. Itu artinya tumbuh generasi-generasi baru aktivis perempuan. Aktivis perempuan di Saudi untuk mengubah kultur yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, mereka melakukan negosiasi-negosiasi budaya. Hatoon Ajwadi Al-Fassi tetap menggunakan abaya dan penguasaan pengetahuan agamanya relatif baik dan artikulatif, sehingga ketika melakukan negosiasi-negosiasi budaya jauh lebih mudah. Hatoon ini melakukan negosiasi budaya secara intensif di negerinya sendiri, melakukan diskusi sesama aktivis perempuan dari luar Saudi untuk menimba ilmu dan pengalaman mereka sambil merumuskan strategi yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Saudi. Betapa beratnya perjuangan Hatoon di tengah rezim politik Saudi yang otoriter dan pandangan keislaman yang ultra-konservatif.

Saudi itu tidak meratifikasi UU anti-diskriminasi terhadap perempuan dalam peraturan perundangan mereka kepada perjanjian-perjanjian hak asasi internasional. Sehingga aktivis perempuan dunia tidak bisa menekan kepada Saudi agar memenuhi hak-hak perempuan, karena Saudi bukan anggota dari perjanjian-perjanjian itu.²⁸

Indonesia merupakan salah satu dari sekian rangkaian destinasi investasi dan kerjasama delegasi Arab Saudi. Tak tanggung-tanggung mereka membawa 25 pangerannya beserta 1.500 delegasi.

Kunjungan bersejarah ini bisa jadi saling menguntungkan, karena ada 11 komitmen yang telah disepakati bersama-sama, memperkuat posisi dan penghormatan bahwa Indonesia adalah mitra strategis Arab Saudi sejak lama. Selain menjadi mitra strategis, tentu Arab Saudi juga dapat belajar melihat wajah keberagaman, kemajemukan, kebebasan dan keterbukaan bagi seluruh warga negaranya dalam menjalankan demokrasi.

Peneliti Senior LIPI, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan terbaik untuk belajar tentang toleransi dan keberagaman.

²⁸ Neng Dara Affiah: Partisipasi Perempuan di Pemilu Saudi Baru Langkah Awal Posted by : Irwan Amrizal in Sosok, Wawancara 12 December 2015, 30.225 Views

Indonesia selama ini bisa melewati berbagai konflik tanpa ada perpecahan. "Di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia Timur cenderung relatif damai. Yang paling penting adalah bagaimana Arab Saudi dapat merealisasi look east policy, menghadapi pesaing seperti rival utamanya Iran," ujarnya saat ditemui di acara Perspektif Indonesia di Jakarta Pusat Sabtu (4/3).

Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud tidak bisa dilihat hanya sebagai kunjungan kenegaraan biasa. Kunjungan itu dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia sebagai 'kiblat' baru Arab Saudi di tengah krisis dan konflik yang berkepanjangan di negara-negara sekelilingnya. "Kalau kita lihat politik Islam di dunia, yang terjadi adalah citra Islam sedang terpuruk. Ini menuntut kerja keras membalikkan citra itu. Dalam hal ini sulit sekali cari negara timur tengah yang tak terlibat konflik. Tak salah mereka melihat Indonesia." Arab Saudi menengok ke timur, yang islamnya sudah moderat dan hidup dalam komunitas yang cukup. Saudi ingin belajar dari Indonesia," jelas Dewi Fortuna.

Pada kesempatan yang sama Peneliti Senior Institut Peradaban sekaligus pengajar di UIN, Ali Munhanif, juga berpendapat kunjungan raja Arab Saudi ke Indonesia bertemu tokoh lintas agama merupakan satu hal positif yang baik dalam cara pandang Arab Saudi terhadap toleransi. "Ini merupakan sebuah lompatan yang sangat besar, bahwa kita bisa berdiri tegak dan mengajarkan mereka hal-hal yang mereka tak punya," imbuhnya. Raja Salman di tengah kunjungannya sempat mengunjungi dan berpidato di gedung DPR. Kondisi demokrasi Indonesia yang tergambar di gedung DPR, seharusnya bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi Arab Saudi. "Dengan mengunjungi DPR maupun lembaga negara yang lain, Islam yang moderat, Arab Saudi juga harus melihat Indonesia sebagai contoh yang bisa dipelajari bahwa reformasi tak bisa dihindari lagi saat ini," pungkas Ali.²⁹

4. Tantangan dan Hambatan Demokrasi bagi Perempuan dan Alternatif Solusi

Kaum perempuan di Indonesia punya hak memilih itu sudah dibicarakan sejak tahun 1935. Ada pionir-pionir kaum perempuan yang harus disebutkan namanya seperti Maria Ulfah Santoso, SK Trimurti, dan lainnya. Mereka sudah mendiskusikan tentang hak memilih bagi kaum perempuan sebelum Pemilu berlangsung pada tahun 1955. Dalam diskusi itu juga mereka memastikan perwakilan perempuan harus ada di *volksraad* atau parlemen. Hal itu sudah dibicarakan dalam gerakan perempuan Hindia Belanda saat itu. Bahkan di saat negara-negara mayoritas Muslim masih melarang ada hakim agama dari kaum perempuan, Indonesia sudah mengangkat *hakim agama perempuan*. Itu pertama kali terjadi saat *Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1950*. Jadi, gerakan kaum perempuan di Indonesia itu sudah sangat maju. Dan bagi negara-negara mayoritas Muslim, Indonesia menjadi pionir dalam urusan gerakan kaum perempuan.

Keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan perubahan yang menjadi kunci utama yang **membuat gerakan perempuan di Indonesia lebih maju**

²⁹ Raja Salman News Politik Demokrasi Arab Saudi, *Arab Saudi Bisa Belajar Toleransi dan Demokrasi dari Indonesia*, Jakarta, Sabtu 04 Maret 2017

dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Indonesia itu adalah pasar ideologi yang ada di seluruh dunia. Pelbagai ideologi itu bertarung untuk mendapatkan tempat di Indonesia. Sementara orang Indonesia sendiri, khususnya kalangan intelektual, mencerna semua ideologi itu lalu memutuskan mana ideologi yang terbaik dari yang ada bagi Indonesia. Walaupun masih ada nilai-nilai patriarki dalam budaya kita, misalnya, tapi kita terbuka pada pandangan yang menghargai hak-hak perempuan. Perempuan sebagai manusia itu benar-benar punya tempat di negeri ini. **Hal itu tidak ada di negara-negara mayoritas Muslim lainnya termasuk Iran yang terkesan menutup diri** dengan peradaban Persianya yang dulu sangat maju dalam gerakan perempuan. Gerakan perempuan Indonesia dan Iran sama-sama sudah muncul sejak tahun 1920-an. Pada tahun itu, Indonesia sudah punya sosok perempuan seperti *Rasuna Said* yang sudah mengkampanyekan hak-hak politik kaum perempuan. Tapi dalam beberapa dekade terakhir *sistem politik Iran* dibuat tertutup. Dampaknya adalah gerakan perempuan di Iran menjadi mundur. Ini juga berlaku di negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

Aktivis perempuan di Malaysia kagum melihat perkembangan Indonesia. Kekaguman mereka itu, misalnya, pada wacana yang diskusikan di kalangan santri tentang isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Di Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang ada buku yang diterbitkan dengan judul “Indahnya Perkawinan Sejenis”. Wacana seperti itu di Malaysia sangat tidak mungkin. Kata aktivis perempuan Muslim Malaysia, Zainah Anwar, “Ya Allah, tidak bisa dibayangkan di negeri kami ada wacana seperti ini”. Dan aktivis perempuan dari Pakistan yang kini menjadi pelapor khusus untuk PBB, *Falida Shaheed*, mengatakan, “Aduh, wacana ini mana bisa ada di Pakistan. Yang ada, kalau dimunculkan wacana ini akan ada pembunuhan”. Menurut Neng Dara (aktivis perempuan Indonesia), untuk hak kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi, Indonesia memang jauh melampaui Pakistan dan Malaysia. “Negara Pakistan dan Malaysia memang maju dalam aspek ekonomi, tapi tidak memberikan kebebasan berpikir dan berekspresi.” Karena itu, jika ada upaya yang ingin mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam ilmu pengetahuan harus benar-benar dilawan. **Indonesia khususnya dengan gerakan perempuannya sudah membuat iri aktivis perempuan dari negara-negara mayoritas Muslim lainnya.** Tapi para perempuan tidak boleh artikulatif di panggung internasional meskipun kekayaan di dunia gerakan kita sangat luar biasa, Karena kemajuan gerakan sosial kita dikagumi banyak pihak. Yang dimaksud tidak artikulatif adalah para aktivis perempuan kurang mempublikasikan hasil risetnya di jurnal-jurnal internasional karena keterbatasan dalam hal bahasa. Di forum-forum internasional juga tidak banyak aktivis perempuan Muslimah yang pandai menggunakan bahasa Inggris. Jadi, aktivis perempuan dari kalangan santri ini harus ditingkatkan lagi kemampuan berbahasanya. Sementara Malaysia itu miskin dalam gerakan perempuan dan gerakan sosialnya. Tapi para aktivisnya paling nyaring berbicara di forum internasional. Bahkan saking miskinnya gerakan sosial di Malaysia, para aktivisnya sering merujuk Indonesia sebagai contohnya. *pertama*, kita itu disuarakan oleh teman-teman aktivis dari Malaysia. *Kedua*, gerakan perempuan dan gerakan sipil lainnya di Indonesia yang kurang adalah

dalam soal pengelolaan finansial. Dalam temuan riset yang saya tulis di disertasi saya, gerakan sosial kita memang sudah sangat maju. Yang tidak maju adalah gerakan perempuan dan gerakan sipil lainnya adalah miskin dari sisi keuangan.

Problem yang dihadapi gerakan aktivisme di Indonesia saat ini adalah iklim demokrasi sudah sedemikian baik, tapi para aktivis itu miskin secara finansial. Inilah yang menjadi problem utama aktivisme di Indonesia saat ini. **Untuk dua kekurangan gerakan perempuan dan gerakan sosial di Indonesia secara umum diperlukan solusinya**, untuk kendala yang pertama tidak ada cara lain selain para aktivis perempuan muslimah harus didorong agar menguasai Bahasa Inggris, selain Bahasa Arab. Untuk kendala kedua yang agak sulit. Karena tidak ada bantuan dari pemerintah untuk hal ini. Yang mungkin bisa dilakukan adalah adanya anggaran yang sensitive jender dari pemerintah. **Kemajuan di Saudi dalam hal memenuhi hak politik kaum perempuan, meski masih tampak setengah hati, itu bisa memberi efek pada negara-negara tetangganya seperti Qatar, Bahrain, Kuwait maupun Uni Emirat Arab**, atas kesediaan negara-negara tetangga Saudi itu untuk membuka diri pada perubahan. Di Asia Tenggara, misalnya, walaupun di Indonesia gerakan aktivisme perempuan sangat maju, tapi tidak bisa memberikan pengaruh pada Malaysia, apalagi pada Brunei Darussalam. Jika pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim tertutup itu mengandaikan perubahan dalam sistem politik mereka kemungkinan besar mereka akan membuka diri atau sebaliknya, mereka menutup diri dari perubahan.³⁰

Untuk menumbangkan rezim otoriter menuju sistem yang demokratis membutuhkan kesadaran dan perjuangan yang luar biasa militan dari seluruh tatanan sosial yang tertindas. Bahkan ketika rezim otoriter berhasil ditumbangkan, transisi menuju demokrasi masih menjadi masa yang secara spesifik sangat menentukan dalam mengaplikasikan prinsip egaliter. Dalam hal itu, perempuan yang “dianugerahi” posisi terbawah dari struktur sosial menjadi semakin berkepentingan untuk memastikan jalur transisi demokrasi agar tidak terjerumus dalam penindasan yang berulang. Memang benar bahwa, demokrasi tidak serta merta menyelamatkan perempuan dari jebakan ketidaksetaraan, namun demokrasi adalah salah satu jembatan bagi perempuan untuk menuju pembebasan. Seluruh persoalan yang dihadapi perempuan dalam kediktatoran baik yang bersifat *gender praktis* maupun *gender strategis* (Molyneux) membutuhkan partisipasi langsung dari perempuan terhadap struktur masyarakat.³¹

D. KESIMPULAN

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki status sebagai hamba Allah fil-Ardhi, yang mengemban *amanat amar ma'ruf nahi mungkar* dengan cara *rahmatan lil 'alamin sesuai dengan* fithrah agama diturunkan. Perempuan dan laki-laki menurut Alquran dianjurkan saling bekerjasama untuk tugas keagamaan, menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-

³⁰ Neng Dara Affiah: Partisipasi Perempuan di Pemilu Saudi Baru Langkah Awal Posted by : Irwan Amrizal in Sosok, Wawancara 12 December 2015, 30.225 Views

³¹ Linda Sudiono, *Perempuan dalam Demokrasi*, Posted by Perempuan Mahardhika at 23.23, 02 Juni 2011, h. 1

teks Alquran juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sebagai hamba Tuhan Perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mennejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan “al-ahliyyah” atau kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut.

Walaupun peran perempuan telah diatur sedemikian rupa dalam konstitusi, namun pada kenyataannya peluang perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik di Indonesia masih bergantung kepada partai politik tempat perempuan tersebut bergabung, sehingga kesempatan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif harus melalui keputusan dari partai politik yang bersangkutan. Minimnya jumlah perempuan dalam arena legislatif disebabkan oleh beberapa tindakan diskriminasi terhadap gender. Para perempuan yang telah bergabung ke dalam partai politik mengemukakan beberapa kesulitan yang terkait perlakuan partai, di antaranya adalah pencalonan calon legislatif oleh partai yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai calon utama (calon nomor satu) dan acap kali memosisikan perempuan hanya sebagai pelengkap persyaratan untuk memenuhi batas kuota.

Dalam membangun demokratisasi di suatu negara, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengusahakan kepentingan umum mereka. Menurut Josep Schumpeter, jalan menuju hal tersebut adalah dengan “metoda demokratis”, dimana di dalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang menempatkan individu dalam posisi berkuasa dan dapat mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif demokratis.

Kembali kepada esensi dari demokratisasi itu sendiri bahwa keadaan ideal adalah keadaan yang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan.³² “Dataran egalitarian” yang diungkapkan oleh Will Kymlicka³³ adalah gagasan mengenai perlakuan yang sama dan setara bagi semua anggota masyarakat. Namun karena diskriminasi gender masih menjadi permasalahan utama dari kehidupan politik di Indonesia, diharapkan keterlibatan perempuan dapat memberikan kontribusi bagi kondisi ideal dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia. Selain itu, harapan berikutnya adalah kaum perempuan Indonesia di masa yang akan datang dapat menunjukkan dirinya sebagai kalangan smart voter dan tidak konservatif. Kaum perempuan Indonesia pada umumnya, lebih memilih politik status quo daripada perubahan yang reformis, apalagi radikal. Faktor tingkat pendidikan dan dukungan masyarakat mengambil andil besar dalam terciptanya pola perilaku kaum perempuan tersebut. Pada akhirnya, peran perempuan dapat dinilai signifikan dalam upaya pembangunan demokratisasi di Indonesia. Meskipun demikian, kenyataan yang harus tetap dikritisi adalah ternyata tidak selalu perempuan akan

³² Held, D 1993, *Prospect for Democracy*, Stanford University Press, Stanford, pp. 172.

³³ Kymlicka, W 1990, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Clarendon Press, Oxford, pp.238-239.

mempresentasikan perempuan.³⁴ Meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam arena politik formal (political society), tidak selalu memperbaiki representasi perempuan. Hal ini berbeda dengan politikus laki-laki yang memang sudah terintegrasi penuh sebagai politicians.³⁵ Akibatnya, politisi perempuan acap kali terjebak dengan gender stereotype yang menghambat potensi dan perilaku mereka dalam berkontribusi di dunia politik.

³⁴ Suryakusuma, J 2009, '*Dirty Politics, Clean Women?*', Jakarta Post, 22 April.

³⁵ Subono, NI 2009, '*Tokoh Politik Perempuan di Asia: Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan?*', Jurnal Perempuan . vol. 63 no.1, pp. 88

Daftar Pustaka

- Nurtjahjo, Hendra. 2008. *Filsafat Demokras, cet. III*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Surlin dan Fatmawati. 2022. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada
- Amirrudin, M. 2009, 'Demokrasi, Golongan Putih dan Potensi Gerakan Perempuan', *Jurnal Perempuan*, vol. 63, no.1, pp. 91
- A n.d., Fleschenberg, 'Asia's Women Participation at The Top: Roaring Tigerness or Tame
- Kittens?', *Women's Political and Representation in Asia*, viewed 14 April 2013, <<http://www.niaspress.dk/files/excerpts/Iwanaga-extract.pdf>>.
- Anshor, Maria Ulfah, *nalar politik PEREMPUAN PESANTREN*, (Cirebon, Fahmina Institut, 2006)
- Affiah, Neng Dara: *Partisipasi Perempuan di Pemilu Saudi Baru Langkah Awal*, Posted by: Irwan Amrizal in Sosok, Wawancara 12 December 2015, 30.225 Views
- Baca antara lain: Q.S. Ali Imran, 195, al Nahl, 97, dan al Taubah, 71
- Badan Pusat Statistik 2013, Jenis Kelamin Penduduk, Badan Pusat Statistik, viewed 05 April 2013, <<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>>
- Christiastuti, Novi-detikNews, FOKUS BERITA: *Hari Perempuan Internasional*, 2017
- Copyright Albalad.co.All righter served, *Pangeran Al-Walid kagumi demokrasi Indonesia*,
- Firdaus, Angga Diharja-detikNews, *POLITIK PEMERINTAHAN ARAB SAUDI*, Makarya Diharja, 2010
- FES, "DEMOKRASI, Panduan bagi Pemula", (The Ridep Institute, 2003)
- Gifford, Clive, *Ensiklopedia Geografi (Ensiklopedia Geografi Dunia untuk Pelajar an Umum)*,(Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2006)
- Held, , *Prospect for Democracy*, Stanford University Press, Stanford, D 1993 pp. 172.
- Kymlicka, W 1990, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Clarendon Press, Oxford, pp.238-239.

- KAS, *Perempuan yang kuat untuk demokrasi yang kuat*, (seminar pelatihan politisi Perempuan yang Berbakat), Balikpapan, 24 Februari 2014.
- Linda Sudiono, *Perempuan dalam Demokrasi*, Posted by Perempuan Mahardhika, 2011
- Masruchah, '*Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia*', Jurnal Perempuan, 2009, vol.63 no. 1, pp.115-116
- Mayer, Thomas, "*Militer dan Demokrasi*", (d'Print Communication, 2003)
- Mayer, Thomas, "*Demokrasi*", (d'Print Communication, 2003)
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokras, cet. III*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Raja Salman News Politik Demokrasi Arab Saudi, *Arab Saudi Bisa Belajar Toleransi dan Demokrasi dari Indonesia*, Jakarta, Sabtu 04 Maret 2017
- Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Sudiona, Linda, *Perempuan Dalam Demokrasi*, Posted by, Perempuan Mahardhika, at 23.23, 2011
- Subono, '*Tokoh Politik Perempuan di Asia : Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan ?*', Jurnal Perempuan . vol. 63 no.1, NI 2009, pp.79
- Soetjipto, A 2009, '*Pemenuhan Hak-Hak Politik Perempuan Sejauh Manakah?*', Jurnal Perempuan. 45
- Suryakusuma, '*Dirty Politics, Clean Women?*', Jakarta Post, 22 April 2009,
- Rosiena, M 2013, '*Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau*', eJournal
- Pemerintah Integratif. viewed 05 April 2013, <[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/E-jurnal%20Mari%20Rosieana%20\(0204-13-03-55-7\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/E-jurnal%20Mari%20Rosieana%20(0204-13-03-55-7).pdf)>.
- RUBRIK/Dunia, *Pelanggaran HAM di Arab Saudi Meningkat*, <http://dw.com/p/1A3CE>, 21.10.2013

* Doktor pada Sekolah Pasca Sarjana (Sps) Kajian Islam dengan Konsentari Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulusan 2020.